STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT KH. MA. SAHAL MAHFUDH TENTANG WALI MUJBIR

Imamul Muttaqin

IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Penelitian dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Wali Mujbir” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimanapemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang wali mujbir? bagaimanametode istinbat hukum KH. MA. Sahal Mahfudh? serta bagaimana analisis terhadap pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh tentang walimujbir?. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis menggunakan teknik dokumenter dengan memakai metode deskriptif dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh terkait dengan wali mujbir ini, bahwa anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya serta orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Sedangkan metode istinbat KH. MA. Sahal Mahfudh adalah dengan menggunakan metode tekstual (mazhab qauliy) dan kedua adalah metode kontekstual/metodologis (manhajy) sekaligus. Di samping itu, nilai masalah juga dijadikan istinbat KH. Sahal dalam menggali sebuah hukum. Sementara itu, analisis terhadap pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh tentang wali mujbir menyimpulkan bahwa pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh tentang hak ijbar oleh orang tua lebih mengedepankan masalah (kemaslahatan). Menurutnya, meminta persetujuan si anak, selain dianggap baik dari sisi nilai ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW, juga didukung

kaidah fikih al-khuru'j min al-khilaf mustahab, keluar dari perbedaan dengan mengompromikan pendapat yang berbeda beda adalah lebih disukai. Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya dalam melaksanakan perkawinan tidak hanya memperhatikan kepentingan sepihak semata, namun juga mesti memperhatikan kepentingan semua pihak yang bersangkutan. Dan hal lain yang perlu diperhatikan, manusia tidak terdiri atas jisim semata. Dia juga memiliki jiwa dan perasaan sehingga kebahagiaannya pun hanya akan sempurna jika kebutuhan keduanya terpenuhi dengan seimbang. Maka dalam setiap mengambil keputusan apapun jenisnya harus dipertimbangkan, tidak terkecuali dalam masalah memilih pasangan hidup yang pada akhirnya bisa tercapai kebahagiaan lahir batin, pernikahan yang penuh mawaddah, mahabbah, wa rahmah.

Kata Kunci: Sahal Mahfud, Wali Mujbir, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa i'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat.

Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa': 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suamiistri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa': 21).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 120.

Perintah menikah bukanlah perintah main-main. Di balik perintah terdapat kesenangan yang boleh dirasakan bersama namun juga tidak luput bahwa dalam perintah tersebut terdapat amanah dan tanggung jawab yang besar.²

Di balik tiap perintah yang Allah berikan kepada makhluk-Nya tidak pernah terlepas dari tujuan dan pastilah memiliki hikmah. Begitu pula dengan anjuran menikah terdapat hikmah yang sangat agung. Di antara hikmah itu antara lain :

Pertama, untuk menjaga dan memelihara kedua suami-istri dari perbuatan yang tercela (haram).³ Kedua, menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral. Seandainya tidak ada perintah dan aturan dalam menikah niscaya tersebar perbuatan mesum dan amoral antara kaum laki-laki dan perempuan. Ketiga, memberikan kesenangan (*istimta'*) bagi kedua belah pihak dengan berbagi hak dan kewajiban masing-masing. Sang suami menanggung dan mencukupi nafkah, makan, minum, sandang dan papan secara wajar (*bi al-ma'ruf*). Keempat, memperkokoh hubungan antar keluarga dan golongan. Banyak di antara keluarga yang pada mulanya saling berjauhan dan tidak saling mengenal satu sama lain, lalu dengan pernikahan terjadi pendekatan hubungan di antara keduanya. Itulah sebabnya mengapa Allah menjadikan hubungan pernikahan bagian dari nasab, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Furqan ayat 54. Kelima, menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih dan sehat, karena pernikahan merupakan factor perkembang-biakan keturunan demi kelestarian umat manusia.⁴

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun

² Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 26.

³ M. Shaleh al-Ustaimin, *Pernikahan Islami*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), 14.

⁴ *Ibid.*, 14.

yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits. Dalam akad nikah terdapat orang tua (wali, asil) dan seorang wakil. Salah satu kebudayaan Arab yang telah berubah menjadi Sunnah Nabi adalah adanya seorang wali bagi perempuan. Adapun dalam al-mithaq,⁵ maka tidaklah terdapat orang tua (asil) atau seorang wakil, dan seorang perempuan dan laki-laki mengambil al-mithaq dengan diri mereka masing-masing. Hal ini menggugurkan pemahaman perwakilan dan perwalian yang merupakan kebudayaan historis yang bisa diabaikan.⁶

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan, yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahamimenghendaki adanya wali seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
أَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

⁵ Kata *al-mithaq* berasal dari kata dasar *wathaqa*. Dari kata dasar ini juga muncul kata *ath-thiqah*, *al-wathaqah*, *al-wathaq*, dan *at-tauthiq*. Ketika terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak atas dasar kepercayaan, maka itulah yang disebut *al-mithaq*, akan tetapi jika terjadi kesepakatan atas dasar keterpaksaan dan pemaksaan, maka ia disebut *al-wathaq*. Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Elsaq Press, cet. 5, 2008), 440.

⁶ *Ibid.*, 441.

“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(Al-Baqarah : 221)⁷

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Namun di samping itu terdapat pula ayat al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa memakai wali.⁸ Dan hadis Nabi SAW, yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

“Tidak sah nikah, kecuali oleh wali”. (H.R.Abu Dawud)⁹
Sabda Rasulullah Saw.

الزَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ¹⁰

“Telah berkata Rasulullah Saw. "Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya".
(Riwayat Muslim).

Istilah wali mujbir sudah dikenal dalam perkawinan, yaitu Wali nikah yang mempunyai hak terhadap anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki dalam batas batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 43.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), 90-91.

⁹ Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan Abu Dawud* Juz III, (Beirut; Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1997), 95.

¹⁰ Sayyid Imam Muhammad bin Isma'il al-Son'ani, *Subul al-Salam*, 119.

Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya. Kebolehan wali mujbir ini dengan syarat sebagai berikut :¹¹

- 1) Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu.
- 2) Jika mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya.
- 3) Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan
- 4) Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut.
- 5) Jika putrinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan lagi.

Menurut beberapa Ulama maz\hab, wali mujbir dalam daerah perwalian (wilayah) terhadap anak gadis, khususnya adalah Ayah maka baginya boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan sang Ayah.

Pendapat ini merupakan pendapat dari Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. Pendapat ini juga senada dengan pendapat al-s\auri.¹²

Masalah wali mujbir, KH. Sahal Mahfudh, salah seorang tokoh Ulama Indonesia berpendapat bahwa, si anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya, orang tua juga berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Jika seorang perempuan mempunyai hasrat menikah dengan laki-laki yang setara, maka orang tua tidak boleh menolak atau melakukan al-adul.

Yang dimaksud setara atau dalam bahasa arabnya al-kufu ialah sederajat atau setingkat dalam aspek, nasab status (kemerdekaan, profesi, dan agama).¹³

Beliau juga berpendapat, hak ijbar yang telah memenuhi syarat tersebut, menurut Muktamar Nahdlatul Ulama, dengan

¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 202.

¹² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* Juz II,

¹³ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya: Khalista, 2010), 241.

merujuk pada kitab *Al-Bujairami 'ala Al-Iqna'*, hanya diperkenankan jika tidak dikhawatirkan membawa akibat yang fatal. Lebih jauh disinggung bahwa yang dimaksud “diperkenankan” pada kasus ijbar di sini bukan berarti mubah, melainkan makruh, yang berarti perkawinan semacam itu sebaiknya tetap dihindari.¹⁴

Biografi KH. MA. Sahal Mahfudh

Sosoknya sangat bersahaja. Bicaranya tenang, lugas, tidak berpretensi mengajari. Padahal KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh sangat disegani. Beliau dua periode menjabat Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (1999-2009) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2000-2010. Pada Musyawarah Nasional (Munas) MUI VII (28/7/2005) Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahda tul ‘Ulama (NU), itu terpilih kembali untuk periode kedua menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2005-2010.

Pada Mukttamar Nahda tul Ulama (NU) di Donohudan, Boyolali, Jateng., Minggu (28/11 2/12/2004), dia pun dipilih untuk periode kedua 2004-2009 menjadi Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahda tul ‘Ulama (NU).¹⁵

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abd. Salam Al-Hajaini, lahir di Kajen, Margoyoso Kabupaten Pati, pada tanggal 17 Desember 1937. Sejak kecil sampai sekarang, KH. Sahal tidak lepas dari pesantren, hidupnya memang di pesantren, lahir di pesantren, besar di pesantren, belajar di pesantren, dan berkembang sampai saat ini di pesantren. Ibunya bernama Hj. Badi’ah (w. 1945) dan ayahnya bernama K. Mahfudh bin Abd. Salam al-Hafidh (w. 1944 kakaknya KH. Abdullah bin Abd. Salam). Keluarga ini mempunyai jalur nasab dengan KH. haji Ahmad Mutamakkin,

¹⁴ Ibid., 241.

¹⁵ Ensiklopedi, “Biografi KH. muhammad achmad Sahal mahfudz Pendobrak pemikiran tradisional NU”, dalam <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/527> , 1 Juli 2011.

seorang perintis agama Islam yang sangat terkenal di desa Kajen khususnya dan Kabupaten Pati pada umumnya. KH. Mahfudh bin Abd. Salam adalah saudara misan (adik sepupu) KH. Bisri Sansuri, salah seorang pendiri jam'iyah NU yang sangat disegani, wafat pada hari Sabtu, 25 April 1981.¹⁶

Tekun mengasuh pondok pesantren Maslakul Huda, ia juga dikenal sebagai aktivis organisasi. Mengetuai Persatuan Pondok Pesantren (Rabiltah Ma'ahid Islamiyah) wilayah Jawa Tengah, ia merangkap jadi Katib Syuriah NU di wilayah yang sama. KH. Sahal pernah berkata, "Pesantren sebagai moderator pembangunan desa," katanya, "merupakan lembaga pendidikan yang mandiri. Bukan milik perseorangan, melainkan milik umat, berfungsi ganda, sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial desa." Bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Jakarta, dan Yayasan Mandiri Bandung, para santri diberi pelajaran Teknologi Tepat Guna. Membentuk Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM), pesantren juga membina koperasi, peternakan, dan pemugaran rumah penduduk. Pada 1967, KH. Sahal menikah dengan Dra. Mafisah, cucu K.H. Bisri Syamsuri, almarhum. Istrinya, lulusan IAIN, selain menjadi guru juga mengasuh pesantren putri Al-Badiyah.¹⁷

Pengembaraan ilmu pengetahuan KH. Sahal tidak berhenti di tempat kelahirannya. Hingga tahun 1957 beliau meneruskan pendidikan di pesantren Bendo, Pare, Kediri asuhan KH. Muhajir. Tiga tahun berikutnya (1957-1960) beliau belajar di Pesantren Sarang, Rembang, di bawah bimbingan KH. Zubair. Dan untuk memperkaya perspektif keilmuan agama yang menjadi basicnya, maka beliau secara serius selama tiga tahun (1951-1953) juga kursus ilmu umum di Kajen. Dari pengembaraannya inilah maka beliau banyak mendapat

¹⁶ Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta; Cermin, 1999), 71.

¹⁷ Bedjobanget, "KH. MA. Sahal Mahfudh", dalam [http : //bedjobanged.wordpress.com /2010/04/02/mbah-Sahal/](http://bedjobanged.wordpress.com/2010/04/02/mbah-Sahal/) , 24 Mei 2011.

pengaruh dari ulama-ulama besar semisal Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama besar yang lain. Sehingga apa yang beliau 'putuskan' dari berbagai persoalan, tidak lepas dari tokoh-tokoh tersebut.¹⁸

Kendati dengan latar belakang keilmuan ala pesantren, namun KH. Sahal memiliki keluasan cara pandang dalam menyikapi berbagai persoalan. Dunia akademis banyak memberikan apresiasi sekaligus kepercayaan kepada beliau untuk bisa mentransformasikan keilmuan di berbagai tempat. Tercatat, beliau pernah menjadi dosen pada kuliah takhassus fiqh di Kajen, Pati (1974-1976), juga tahun 1974-1976 sebagai staf pengajar di Fakultas Tarbiyah UNCOK, Pati, tahun 1982-1985 dipercaya menjadi dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Bahkan semenjak tahun 1989 beliau menjadi Rektor Institut Islam Nahdatul 'Ulama (Jepara).¹⁹

Analisis Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir

Telah disinggung bahwa dalam hal wali mujbir, KH. Sahal dalam berpendapat tidak lepas dari pendapat-pendapat para Imam maz\hab. Beliau mencantumkan pendapat Imam Syafi'i, bahwa wali mujbir ini menurut Syafi'iyah, berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil maupun sudah dewasa, jika ia masih gadis tanpa persetujuan darinya begitu juga anak yang gila baik laki-laki maupun perempuan, baik sudah dewasa atau masih kecil.

Sedang anak perempuannya yang sudah janda tidak berhak dipaksa baik ia sudah dewasa ataupun masih kecil. Pendapat ini berdasarkan pada hadis\ Nabi Muhammad saw:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا) رواه الدار قطني)

"Telah berkata Rasulullah Saw. "Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya". (Riwayat Daruqutni).

¹⁸ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, 463.

¹⁹ *Ibid.*, 464.

Dalam hadis tersebut, ayah mengawinkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa menyebutkan harus meminta izin terlebih dahulu pada anak perempuan tersebut, sebagai bukti bahwa perkawinan itu sah.²⁰

Dengan mendasarkan kepada pendapat Imam Syafi'i itu, suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Dengan demikian adanya wali dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam kehidupan perkawinannya. Di samping itu adanya wali dalam suatu perkawinan telah pula ditetapkan sebagai salah satu rukunnya, sehingga tidak dapat ditinggalkan apabila menghendaki sahnya perkawinan yang dilaksanakan.

Sebagaimana pesan Nabi Muhammad, 82 hari sebelum beliau berpulang kerahmatullah, "Takutlah kamu kepada Allah mengenai urusan wanita, karena kamu telah mengambil mereka (dari peringatannya) dengan amanat Allah". Hal ini menunjukkan bahwa wanita memiliki derajat yang tinggi di mata Allah. Sehingga wanita memiliki harkat dan martabat yang perlu dilindungi, karena wanita merupakan makhluk yang paling mulia dalam kehidupan bermasyarakat.

KH. Sahal juga sepakat dengan argumen Imam Hanafi yang tidak mengakui adanya hak *ijbar* terhadap anak perempuan yang telah balig secara mutlak, baik perawan maupun janda. Argumen yang digunakan menurut pendapat ini, jika dalam masalah jual beli saja unsur kerelaan menjadi syarat keabsahan akad, tentu hal yang sunnah juga jika berlaku dalam masalah perkawinan, yang jauh lebih penting.

Masih menurut Abu Hanifah, bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan di mana jika wanita sudah dewasa, berakal dan cerdas mereka bebas bertassaruf dalam hukum-hukum mu'amalat menurut syara', maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung. Menurut beliau, walaupun

²⁰ Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 191.

wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak I'tirad (mencegah perkawinan). Menurut KH. Sahal kesetaraan itu seperti disinggung dalam kitab fath Al-Mu'in merupakan hak anak dan orang tua.

Masalah wali mujbir, KH. Sahal berpendapat bahwa, si anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya, orang tua juga berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Jika seorang perempuan mempunyai hasrat menikah dengan laki-laki yang setara, maka orang tua tidak boleh menolak atau melakukan al-adul. Yang dimaksud setara atau dalam bahasa Arabnya al-kufu ialah sederajat atau setingkat dalam aspek, nasab status (kemerdekaan, profesi, dan agama).

KH. Sahal juga berpendapat, hak ijbar yang telah memenuhi syarat tersebut, hanya diperkenankan jika tidak dikhawatirkan membawa akibat yang fatal. Lebih jauh disinggung bahwa yang dimaksud "diperkenankan" pada kasus ijbar di sini bukan berarti mubah, melainkan makruh, yang berarti perkawinan semacam itu sebaiknya tetap dihindari. Menurut beliau persetujuan calon mempelai hendaknya mendapat perhatian sewajarnya. Meminta persetujuan si anak, selain dianggap baik dari sisi pengamatan Rasulullah SAW, juga didukung kaidah fikih al-khuru j min al-khilaf mustahab, keluar dari perbedaan dengan mengompromikan pendapat yang berbeda-beda adalah sunnah.

Dari uraian itu bisa dipahami, KH. Sahal lebih condong terhadap pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak mengakui adanya hak ijbar oleh orang tua. Karena, meskipun dalam kesimpulannya beliau menggunakan istilah "mengkompromikan", namun dalam pendapatnya beliau mengatakan bahwa meski hak ijbar itu telah memenuhi syarat-syarat seperti apa yang disampaikan oleh golongan Syafi'iyah, perkawinan yang semacam itu menurut beliau hukumnya makruh. Ketidak sepakatan KH. Sahal dengan Imam Syafi'i, lebih kepada metodologi yang digunakan, dimana Imam Sayfi'i

lebih mengedepankan qiyas dan ‘illah hukum dalam berijtihad dan mengesampingkan aspek masalahnya. Tentu hal ini berbeda dengan KH. Sahal, yang mana masalah selalu dijadikan acuan syari’ah meskipun tetap berpegang kepada kaidah usul fiqh, tradisi Nabi, praktek sahabat dan para fuqaha’’. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penggalian hukum, KH. Sahal selalu menjaga sikap proporsional yakni tidak hanya mengikuti arus modernitas liberal semata, namun juga tetap berada dalam frame kewahyuan.

Ada perkataan KH. Sahal yang mengatakan, “Dalam konteks ini pula maka kriteria mu’tabar yang sudah direduksi menjadi hanya melulu kitab-kitab mazhab empat, sebetulnya tidak senafas dengan semangat fiqh sebagai produk ijtihad. Mengapa demikian? Sebab kriteria mu’tabar dan gairu mu’tabar berarti di situ ada pandangan yang mengunggulkan pendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat imam lain. Ini sudah menyalahi kaidah "*al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad*" di atas”. Alasan beliau, guna untuk menghindari fanatisme bermazhab. Prinsipnya, mana yang "*reasonable*" dan "*applicable*" bisa digunakan. Inilah yang selalu dijadikan pedoman KH. Sahal dalam menetapkan suatu persoalan hukum. Itulah mengapa dalam menetapkan masalah wali mujbir ini, KH. Sahal tidak lepas dari mencantumkan beberapa pendapat para ulama yang notabene pendapat-pendapat yang disampaikan berbeda dan bahkan bertentangan.

Metode istinbat KH. MA. Sahal Mahfudh

Metode penggalian hukum (*al istinbat al ahkam*) KH Sahal pada dasarnya dibagi dalam dua tipologi. Pertama, metode tekstual (*mazhab qauli*). Dan kedua, metode kontekstual/metodologis (*mazhab manhaji*) serta dengan acuan nilai masalah. Metode tekstual digunakan KH. Sahal terutama ketika memberikan “fatwa hukum” sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Sedangkan metode kontekstual dilakukan KH Sahal dalam forum-forum ilmiah keagamaan seperti bahsul masa’il NU,

seminar, atau ketika KH. Sahal berijtihad sendiri untuk memecahkan persoalan yang pelik.

Berangkat dari asumsi formalistik terhadap fiqh, bahwa fiqh oleh sebagian orang muslim diperlakukan sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat dan bahkan dianggap sebagai kitab suci kedua setelah Al-Qur'an. Maka KH. Sahal berpandangan sendiri bahwa memahami kitab kuning (fiqh) haruslah secara kontekstual dan mengurangi interpretasi tekstual yang selama ini cenderung berlebihan.

Perilaku mensyakkalkan fiqh bisa melahirkan taklid buta dan juga fanatisme bermazhab yang akan mengurangi kepekaan terhadap perkembangan zaman, perilaku tersebut juga menjadi salah satu penyebab untuk lebih memperhatikan ushulnya. Padahal ushul lebih penting dari furû'-nya. Dalam hal ini apa yang dilakukan KH. Sahal dengan mencoba memberi pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mensyakkalkan kitab kuning adalah sesuai dengan misi syari'at Islam itu sendiri, bahwa fiqh haruslah bisa berkembang dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

Karena ketika telah diyakini bahwa rumusan fiqh ulama klasik yang tertuang dalam kitab kuning itu adalah kebenaran mutlak dan telah lengkap menyentuh ke seluruh kehidupan dan zaman, maka bisa dipastikan mereka akan mengesampingkan ushul fiqh atau minimal kurang perhatiannya mereka terhadap usul fiqh tersebut. Yang kemudian ushul fiqh akan mengalami kemandegan. Dan jika ushul fiqh telah mengalami kemandegan maka bisa dipastikan fiqh tidak akan pernah mengalami perkembangan dan tidak akan pernah ditemukan "fiqh baru" yang selaras dengan zaman.

Analisis Metode Istinbat KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir

Dalam kasus wali mujbir ini, sangat terlihat bagaimana KH. Sahal lebih mengedepankan masalah, artinya dengan jalan mengompromikan antara pendapat yang menghendaki adanya hak ijbār oleh orang tua terhadap anaknya dengan pendapat yang tidak mengakui adanya hak ijbār oleh orang tua, diharapkan

dapat memberikan masalah dan kebahagiaan bagi si anak maupun kepentingan orang tua. Dari sini kita tahu, KH. Sahal memandang aspek masalah sebagai acuan dalam beristinbat dengan tetap memperhatikan pendapat para ulama fuqaha'.

Untuk menentukan dan menemukan masalah ini, ada dua kata kunci. Untuk dimensi kemaslahatan duniaakhirat, faktor penyebab, dan hal-hal yang merusak, maka harus dikembalikan kepada syara', kalau masih belum jelas, maka dicari dalil-dalil syara', yakni al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas mu'tabar, dan istidlal sahh. Sedangkan dimensi kemaslahatan dunia, faktor-faktor penyebab, dan hal-hal yang merusak, bisa diketahui dengan akal, hal-hal yang sifatnya daruri (pasti-dengan kalkulasi akal dan panca indra), eksperimentasi, kebiasaan, asumsi-asumsi, jika masih belum jelas, maka dicari dari sumbernya (dalil).²¹

Namun untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang dinamis, maka illat hukumnya adalah nilai ideal moral, seperti keadilan, kesejahteraan, integritas, akuntabilitas, kemaslahatan, dan kekeluargaan.²²

Hal inilah yang dicoba oleh KH. Sahal untuk digunakan dalam penggalian hukum tentang wali mujbir, di mana nilai ideal moral yaitu nilai keadilan dan kekeluargaan bisa tercapai. Dalam konteks menegakkan nilai keadilan ini, apa yang disampaikan oleh KH. Sahal merupakan bentuk respon terhadap pembelaan kaum tertindas, dalam arti penting, bahwa pemikiran beliau selalu berpihak kepada kepentingan umum.

Sampai dalam tahap ini, kiranya penulis sepakat dengan pendapat KH. Sahal tentang wali mujbir. Karena apa yang beliau sampaikan, dalam rangka kontekstualisasi pemahaman terhadap teks fiqih yang selalu menjadikan masalah atau maqasid as-Syari'ah sebagai fokus dalam melihat permasalahan. Corak pemikiran ini tergolong pemikiran yang kompromistik dan mengambil jalan tengah, dalam arti masih mengakui sisi

²¹ Jamal Ma'mur Asmuni, *Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, 283.

²² 23 Ibid., 284.

positif teks-teks fiqh dan usul fiqh klasik (keharusan bermazhab), dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang wali mujbir, dan tidak mengabaikan realita bahwa, dalam kenyataan sekarang masih terdapat penyalahgunaan praktek kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dengan alasan orang tua mempunyai hak ijbar atas anaknya.

Dengan mengambil dasar qawa'id al-fiqhiyyah, (al-khuruj min al-khilaf mustahab), dalam mengompromikan dua pendapat yang berbeda soal wali mujbir ini, KH. Sahal mencoba untuk mengkontektualisasikannya dalam tataran realita yang ada di masyarakat. Sebagai pertimbangan dan acuan utama adalah maqasid al-syari'ah menandakan bahwa KH. Sahal masih berpegang kepada kaidah-kaidah ushul fiqh yang sudah menjadi tradisi di lingkungan pesantren.

Jika dilihat bahwa urgensi fiqh sosial yang disampaikan oleh KH. Sahal, yang salah satunya kepedulian dan keberpihakan pada kepentingan dan masalah yang lebih besar, sehingga relatif bisa mencegah sikap pemaksaan kehendak.²³ Maka sangatlah wajar dan beralasan jika KH. Sahal berpendapat bahwa, dalam masalah wali mujbir ini kiranya bisa mengompromikan antara pendapat yang pro wali mujbir dan yang kontra adanya hak ijbar oleh orang tua. Hal ini dikarenakan betapa sangat peduli dan keberpihakannya KH. Sahal terhadap masalah dan kepentingan umum.

Di akhir tulisan ini, penulis ingin menyampaikan, bahwa apa yang telah disampaikan oleh KH. Sahal Mahfud di atas merupakan pesan yang disampaikan melalui tulisan, yang kiranya beliau hendak menyadarkan kepada kita bahwa, ternyata masih ada persoalan-persoalan baru yang tentunya berbeda keadaan sekarang dengan keadaan ulama-ulama dahulu, sehingga sangat mungkin berbeda pula hukumnya.

Hal demikian sangatlah logis dan terbukti secara akademis, karena bagaimanapun roda kehidupan manusia

²³ Sumanto al-Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, 148.

senantiasa berdinamika sehingga menjadi keniscayaan munculnya problematika baru di kancah kehidupan manusia yang belum pernah ada pada masa dahulu.

Penutup

Dalam masalah wali mujbir ini, KH. Sahal berpendapat bahwa, si anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya, orang tua juga berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Menurut beliau persetujuan calon mempelai hendaknya mendapat perhatian sewajarnya. Meminta persetujuan si anak, selain dianggap baik dari sisi pengamatan Rasulullah SAW, juga didukung kaidah fikih al-khuruj min al-khilaf mustahab, keluar dari perbedaan dengan mengompromikan pendapat yang berbeda-beda adalah sunnah.

Dalam metode pengambilan hukum (istinbat) KH. Sahal menggunakan dua metode sekaligus. Pertama adalah menggunakan metode tekstual (mazhab qauliy); dan kedua adalah metode kontekstual/metodologis (manhajy) serta dengan acuan nilai masalah. Metode tekstual digunakan KH. Sahal ketika memberikan “fatwa hukum”. Sedangkan metode kontekstual dilakukan KH. Sahal dalam forum-forum ilmiah keagamaan seperti bahsul masail NU, seminar atau ketika KH. Sahal berijtihad sendiri untuk memecahkan persoalan yang pelik yang menjadi tuntutan umat.

Melalui analisis data yang diperoleh, maka dapat penulis simpulkan bahwa sangat terlihat bagaimana KH. Sahal lebih mengedepankan masalah, artinya dengan jalan mengompromikan antara pendapat yang menghendaki adanya hak ijbar oleh orang tua terhadap anaknya dengan pendapat yang tidak mengakui adanya hak ijbar oleh orang tua, diharapkan dapat memberikan masalah dan kebahagiaan bagi si anak maupun kepentingan orang tua. Dari sini dapat diketahui, KH. Sahal memandang aspek masalah sebagai acuan dalam beristinbat dengan tetap memperhatikan pendapat para ulama fuqaha’.

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2007
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005
- Jamal Ma'mur Asmuni, *Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh*
- Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- M. Shaleh al-Ustaimin, *Pernikahan Islami*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, cet. 5, 2008
- Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan Abu Dawud Juz III*, Beirut; Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1997
- Sayyid Imam Muhammad bin Isma'il al-Son'ani, *Subul al-Salam*
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2010
- Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta; Cermin, 1999
- Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999
- Bedjobanget, "KH. MA. Sahal Mahfudh", dalam [http :
//bedjobanged.wordpress.com /2010/04/02/mbah-Sahal/](http://bedjobanged.wordpress.com/2010/04/02/mbah-Sahal/) ,
24 Mei 2011.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1989

Imamul Muttaqin: *Studi Analisis terhadap KH. MA. Sahal Mahfud...*

Ensiklopedi, *Biografi KH. muhammad achmad Sahal mahfudz Pendobrak pemikiran tradisional NU*, dalam <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/527> , 1 Juli 2011.